



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 59
TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN
DAN PENYALURAN SERTA PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang: a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 8 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta guna teknis pelaksanaan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penyaluran serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 perlu diubah dan disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penyaluran serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 5);

14. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 57);
15. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 59);
16. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 54) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 26);
17. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penyaluran serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 59 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENYALURAN SERTA PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penyaluran serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 59), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Desa.
9. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa non Pegawai Negeri Sipil dan Perangkat Desa lainnya.
10. Peraturan Desa adalah peraturan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

12. Pengalokasian ADD adalah besaran ADD yang diterima oleh Desa.
13. Penyaluran ADD adalah proses pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah yang disingkat RKUD ke Rekening Kas Desa yang disingkat RKD.
14. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
15. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
18. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
19. RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pekalongan.
20. Rekening Kas Desa yang disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa.
21. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.

23. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
25. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
26. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.
27. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
28. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat daerah kabupaten Pekalongan.
29. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
30. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau disingkat SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
31. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penggunaan ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa Non PNS, Sekretaris Desa Non PNS dan Perangkat Desa Non PNS; dan
 - b. diberikan dengan alokasi besaran sebagai berikut:
1. Kepala Desa paling sedikit Rp2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120% (seratus dua puluh perseratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
 2. Sekretaris Desa paling sedikit Rp2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh perseratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
 3. Perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus perseratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan
 4. Besaran persentase 120% (seratus dua puluh perseratus), 110% (seratus sepuluh perseratus), dan 100% (seratus perseratus) sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- (2) Selain untuk penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggunaan ADD diprioritaskan untuk :
- a. Premi asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebesar 9,24% (sembilan koma dua puluh empat perseratus) terdiri dari 6,24% (enam koma dua puluh empat perseratus) dibayarkan oleh Pemerintah desa dan 3% (tiga perseratus) dari Penghasilan tetap dibayar oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa;

- b. Premi asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebesar 1% (satu perseratus) dari Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dipotong dan dibayarkan oleh BUD;
 - c. Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa;
 - d. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
 - e. Operasional Pemerintah Desa;
 - f. Tunjangan BPD;
 - g. Operasional BPD;
 - h. Peningkatan Kapasitas BPD;
 - i. Honorarium tenaga profesional tertentu; dan
 - j. Operasional Kelembagaan Desa.
- (3) Besaran tunjangan Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, diberikan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tunjangan Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa paling banyak sebesar Rp1.673.360,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
 - b. Tunjangan Kepala Desa yang berstatus PNS diberikan setara dengan TPP Lurah;
 - c. Tunjangan Sekretaris Desa paling banyak sebesar Rp700.580,00 (tujuh ratus ribu lima ratus delapan puluh rupiah); dan
 - d. Tunjangan Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling banyak sebesar Rp112.800,00 (seratus dua belas ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf f, dengan mengecualikan dari ketentuan Pasal 61 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, diberikan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tunjangan Ketua paling banyak sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - b. Tunjangan Wakil Ketua paling banyak sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - c. Tunjangan Sekretaris paling banyak sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dan

- d. Tunjangan Ketua Bidang paling banyak sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - (5) Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), dilaksanakan secara non tunai.
 - (6) Pemerintah Desa dapat menggunakan di luar prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan kewenangan Desa apabila semua prioritas tersebut telah terpenuhi.
3. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 9 Juni 2020

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

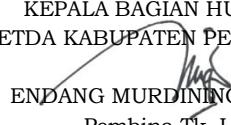
Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 9 Juni 2020

ASIP KHOLBIHI

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2020 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


ENDANG MURDININGRUM, SH.
Pembina Tk. I
Nip. 19631005 199208 2 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 59 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENYALURAN SERTA PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

I. KEBIJAKAN UMUM ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

A. PENGELOLA ALOKASI DANA DESA

1. Pengelola ADD terdiri dari:

a. Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten.

Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati berjumlah ganjil dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- 1) Penasehat : Bupati.
- 2) Wakil Penasehat : Wakil Bupati.
- 3) Penanggungjawab : Sekretaris Daerah.
- 4) Wakil Penanggungjawab : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda.
- 5) Ketua : Kepala Dinas PMD, P3A dan PPKB.
- 6) Wakil Ketua : Sekretaris Dinas PMD, P3A dan PPKB.
- 7) Sekretaris : Kepala Bidang Admininstrasi dan Penataan Pemerintahan Desa Dinas PMD, P3A dan PPKB.
- 8) Anggota : Perangkat Daerah terkait, meliputi:
 - a) Inspektorat;
 - b) BAPPEDA LITBANG;
 - c) BPKD;
 - d) Bagian Hukum Setda;
 - e) Dinas PMD, P3A dan PPKB.

b. Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kecamatan.

Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat berjumlah ganjil dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- 1) Ketua : Camat.
 - 2) Wakil Ketua : Sekretaris Kecamatan.
 - 3) Sekretaris : Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan Pelayanan Umum.
- c. Anggota : Paling banyak 4 (empat) orang.
- d. Tim Pelaksana Tingkat Desa.

Tim Pelaksana Kegiatan ADD Tingkat Desa adalah bagian dari pelaksanaan APBDesa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, berlaku sejak awal tahun anggaran, terdiri dari:

- 1) Kepala Desa : selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).
- 2) Sekretaris Desa : selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).
- 3) Kasi / Kaur : selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) sesuai dengan bidangnya.
- 4) Kaur Keuangan : menjalankan fungsi Kebendaharaan.

- e. Tim Pengelola Kegiatan (TPK)/Pengadaan Barang/Jasa.

Tim Pengelola Kegiatan (TPK)/Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berjumlah ganjil minimal 3 (tiga) orang, dengan susunan sebagai berikut:

- 1) Ketua : berasal dari unsur Perangkat Desa
- 2) Sekretaris : dapat berasal dari unsur Perangkat Desa Kewilayahan/Lembaga Kemasyarakatan.
- 3) Anggota : dapat berasal dari unsur Perangkat Desa Kewilayahan/Lembaga Kemasyarakatan.

B. MEKANISME PENGAJUAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA.

Mekanisme pengajuan penyaluran ADD Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan secara bertahap setiap tiga bulan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tingkat Desa:

Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati cq. Kepala Dinas PMD, P3A dan PPKB melalui Camat setempat, dengan dilampiri :

Tahap I

- a. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang telah ditetapkan dan dicetak menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes);
- b. Surat Bukti Penerimaan (A2) yang ditandatangani Kepala Desa lembar asli bermeterai Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah);

- c. Foto copy Buku Rekening Kas Desa atas nama Desa pada Bank Pemerintah dan menunjukkan asli Buku Rekening Desa;
- d. Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Kepala Desa untuk 1 (satu) Tahun Anggaran;
- e. Laporan Realisasi dan surat pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya; dan
- f. Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa) Tahun 2020.

Tahap II

- a. Surat Bukti Penerimaan (A2) yang ditandatangani Kepala Desa lembar asli bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- b. Foto copy Buku Rekening Kas Desa atas nama Desa pada Bank Pemerintah dan menunjukkan asli Buku Rekening Desa;
- c. laporan realisasi dilengkapi surat pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahap I.

Tahap III

- a. Surat Bukti Penerimaan (A2) yang ditandatangani Kepala Desa lembar asli bermeterai Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah);
- b. Foto copy Buku Rekening Kas Desa atas nama Desa pada Bank Pemerintah dan menunjukkan asli Buku Rekening Desa;
- c. laporan realisasi dilengkapi surat pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahap II.

Tahap IV

- a. Surat Bukti Penerimaan (A2) yang ditandatangani Kepala Desa lembar asli bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- b. Foto copy Buku Rekening Kas Desa atas nama Desa pada Bank Pemerintah dan menunjukkan asli Buku Rekening Desa;
- c. laporan realisasi dilengkapi surat pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahap III.

2. Tingkat Kecamatan:

- a. Memberi rekomendasi permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa sesuai tahapan, dengan cara:
 - 1) memastikan bahwa kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa sudah tercantum dalam Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2020;

- 2) mengoreksi kelengkapan persyaratan pengajuan penyaluran Alokasi Dana Desa; dan
 - b. meneruskan permohonan penyaluran kepada Bupati Cq. Kepala Dinas PMD, P3A dan PPKB setelah persyaratan lengkap dan sesuai ketentuan tahapan penyaluran Alokasi Dana Desa.
3. Tingkat Kabupaten:
 - a. Dinas PMD,P3A dan PPKB mengajukan permohonan persetujuan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati berdasarkan permohonan Kepala Desa yang telah direkomendasi oleh Camat; dan
 - b. berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, BPKD melakukan penyaluran ADD dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
 4. Khusus untuk pengajuan penyaluran ADD yang digunakan untuk pembayaran premi BPJS Kesehatan dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Premi sebesar 4% (empat per seratus) dari Penghasilan Tetap dianggarkan dalam APBD dan dibayarkan oleh Dinas PMD,P3A dan PPKB;
 - b. Premi sebesar 1% (satu per seratus) dari Penghasilan Tetap dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD dan dibayarkan oleh BUD;
 - c. Mekanisme pengajuan pembayaran premi BPJS Kesehatan dilakukan oleh Dinas PMD, P3A dan PPKB kepada BUD setiap awal bulan dari triwulan tahapan ADD sesuai data kepesertaan BPJS Kesehatan tanpa menunggu pengajuan penyaluran ADD dari Pemerintah Desa;
 - d. Pengajuan pembayaran premi BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan mulai awal Juli 2020.

C. MEKANISME PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA.

Pencairan ADD dari Rekening Kas Desa dilakukan dengan cara :

1. pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk diverifikasi oleh Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD, dan disetujui oleh Kepala Desa;
2. Kepala Desa mengajukan permohonan Pencairan ke Rekening Kas Desa di Bank Pemerintah, dengan tembusan kepada Camat; dan
3. Khusus pemindahbukuan Penghasilan Tetap sudah dikurangi pemotongan pembayaran premi BPJS Kesehatan sebesar 1% (satu per seratus).

D. PENGENAAN PAJAK PADA PELAKSANAAN KEGIATAN ALOKASI DANA DESA.

1. Kewajiban perpajakan Bendahara Desa atas penggunaan dana APBDesa adalah melakukan pemotongan/pemungutan pajak, penyetoran pajak ke kas negara serta pelaporan pajak menggunakan SPT Masa setiap bulannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

2. Tata Cara Pemotongan/Pemungutan Pajak.

a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pada prinsipnya semua barang dan jasa dikenakan PPN kecuali yang dikecualikan oleh peraturan perundang- undangan yang berlaku. Bendahara Desa mengenakan PPN apabila pembayaran atas pengadaan/pembelian barang/jasa yang nilainya melebihi Rp1.000.000,00 (nilai termasuk PPN terutang), baik kepada penyedia barang/jasa yang Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun kepada penyedia barang/jasa Bukan PKP. Salah satu ciri dari penyedia barang/jasa PKP adalah penyedia barang/jasa tersebut membuat Faktur Pajak. Rumus menghitung PPN = Dasar Pengenaan Pajak (DPP) x tarif

Penyedia barang/jasa PKP = $(100/110 \times \text{Nilai Pembayaran}) \times 10\%;$ dan

Penyedia barang/jasa Bukan PKP = $\text{Nilai Pembayaran} \times 10\%.$

b. PPh Pasal 22

Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang yang nilainya melebihi Rp2.000.000,00, selain dikenakan PPN sebesar 10% (sepuluh perseratus), maka Bendahara Desa juga mengenakan PPh Pasal 22 atas pembayaran tersebut. Besarnya tarif PPh Pasal 22 adalah 1,5%, (satu koma lima perseratus) apabila penyedia barang mempunyai NPWP. Apabila penyedia barang tidak mempunyai NPWP ataupun tidak memberikan NPWP maka tarif PPh Pasal 22 adalah 3% (tiga perseratus).

Rumus menghitung PPh Pasal 22 adalah Dasar Pengenaan Pajak (DPP) x tarif , dengan perincian sebagai berikut :

Penyedia barang/jasa PKP = $(100/110 \times \text{Nilai Pembayaran}) \times 1,5\%;$

Penyedia barang/jasa Bukan PKP ber-NPWP = $\text{Nilai Pembayaran} \times 1,5\%;$ dan

Penyedia barang/jasa Bukan PKP tidak ber-NPWP = $\text{Nilai Pembayaran} \times 3\%.$

Apabila Penyedia barang/jasa memberikan dokumen berupa Fotokopi Surat Keterangan Bebas (SKB) yang telah dilegalisir

oleh KPP, maka Bendahara Desa tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22.

c. PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

Pembayaran berupa honorarium, uang lembur, uang transport atau penghasilan dengan nama apapun dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 sebesar 5% (lima perseratus) tanpa PTKP bagi yang memiliki NPWP, sedangkan yang tidak memiliki NPWP dikenakan sebesar 6% (enam perseratus) tanpa PTKP. Pembayaran berupa penghasilan tetap yang rutin dibayarkan setiap bulan, penghitungan pajaknya menggunakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

d. PPh Pasal 23

Pembayaran kepada penyedia barang/jasa berkaitan dengan jasa dan sewa perlengkapan/peralatan dikenakan PPh Pasal 23. Rumus menghitung PPh Pasal 23 adalah Dasar Pengenaan Pajak (DPP) x tarif , dengan perincian sebagai berikut :

Penyedia barang/jasa PKP = $(100/110 \times \text{Nilai Pembayaran}) \times 2\%;$

Penyedia barang/jasa Bukan PKP ber-NPWP = Nilai Pembayaran $\times 2\%;$ dan

Penyedia barang/jasa Bukan PKP tidak ber-NPWP = Nilai Pembayaran $\times 4\%.$

Apabila pembayarannya melebihi Rp1.000.000,00, maka Bendahara Desa juga mengenakan PPN sebesar 10%.

Apabila Bendahara Desa memperoleh Fotokopi Surat Keterangan Bebas (SKB) yang telah dilegalisir oleh KPP dari penyedia barang/jasa, maka Bendahara Desa tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 23.

e. PPh Final Pasal 4 ayat (2)

Pembayaran berkaitan dengan sewa tanah dan atau bangunan dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat (2) dengan tarif 10 % (sepuluh persen) dari nilai pembayaran.

3. Tata Cara Penyetoran Pajak.

a. Batas waktu Penyetoran PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPh Final Pasal 4 ayat (2) paling lambat tanggal 10 (sepuluh)

setelah masa pajak berakhir. Surat Setoran Pajaknya menggunakan NPWP Bendahara Desa.

- b. Batas waktu penyetoran PPN dan PPh Pasal 22 adalah paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pembayaran. Surat Setoran Pajak menggunakan NPWP penyedia barang/jasa apabila PKP. Apabila penyedia barang/jasa bukan PKP ataupun tidak menunjukan NPWP, setoran pajaknya menggunakan NPWP Bendahara Desa.
- c. Keterlambatan penyetoran pajak, Bendahara Desa dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) per-bulan, yang akan ditagih oleh KPP menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP).

4. Tata Cara Pelaporan Pajak.

Bendahara Desa diwajibkan untuk melakukan pelaporan SPT Masa pada setiap bulannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atas pajak-pajak yang sudah disetorkan ke Kas Negara, dengan ketentuan:

- a) Batas waktu pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21, SPT Masa PPh Pasal 22, SPT Masa PPh Pasal 23 dan SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2) adalah tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
- b) Batas waktu pelaporan SPT Masa PPN adalah akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
- c) Apabila tidak lapor atau terlambat melaporkan SPT Masa setiap bulannya, Bendahara Desa dapat dikenakan denda sebesar Rp100.000,00 untuk setiap SPT Masa Pajak Penghasilan dan denda sebesar Rp500.000,00 untuk setiap SPT Masa PPN, yang akan ditagih oleh KPP menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP).

5. Kegiatan penyediaan makan dan minuman dikenakan Pajak Daerah sebesar 10% (sepuluh perseratus) dan dibayarkan melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan.

6. Pengenaan bea meterai pada pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai. Bea meterai dalam pengelolaan keuangan Desa, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang memuat jumlah uang, ketentuannya adalah:

- 1) transaksi sampai dengan nilai nominal Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tidak dikenakan bea meterai;
 - 2) transaksi dengan nilai nominal lebih dari Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dikenakan bea meterai sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah); dan
 - 3) transaksi dengan nilai nominal lebih dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikenakan bea meterai sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah).
- b. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata maka dikenakan bea meterai sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah).
7. Penatausahaan.

- a. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- b. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- c. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- d. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- e. Pengenaan pajak pada pelaksanaan kegiatan ADD:

- 1) Pembelian/pengadaan barang yang bernilai minimal Rp1.000.000,00 hanya dikenakan PPN sebesar 10%. Sedang untuk pengadaan barang minimal sebesar Rp2.000.000,00 dikenai PPN sebesar 10% dan PPh Pasal 22 sebesar 1,5%, bagi penyedia barang yang tidak memiliki NPWP dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 3% dengan cara penghitungan sebagai berikut:

$$\text{PPN} = (100/110 \times \text{Nilai Nominal}) \times 10\%(\text{PKP})$$

$$10\% \times \text{Nominal} (\text{Non PKP})$$

$$\text{PPh Pasal 22 (ber NPWP)} = (100/110 \times \text{Nilai Nominal}) \times 1,5\% (\text{PKP}) 1,5\% \times \text{Nominal} (\text{Non PKP})$$

$$\text{PPh Pasal 22 (tidak ber NPWP)} = (100/110 \times \text{Nilai Nominal}) \times 3\% (\text{PKP}) 3\% \times \text{Nominal} (\text{Non PKP})$$

Untuk pembayaran pajak menginduk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penyedia barang/toko/Bendahara Desa.

- 2) Pengenaan pajak berupa honorarium, uang lembur dikenakan pemotongan PPhPSL. 21 sebesar 5% bagi yang memiliki NPWP, sedangkan yang tidak memiliki NPWP

dikenakan PPhPSl. 21 sebesar 6%, untuk pembayaran pajak menginduk pada Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa;

- 3) Pengenaan pajak jasa dan sewa perlengkapan/peralatan dikenakan PPhPSl 23 sebesar:
 - a) Sebesar 2% dari transaksi bagi yang memiliki NPWP dan yang tidak memiliki NPWP dikenakan PPh sebesar 4%;
 - b) Rp1.000.000,00 keatas dikenakan PPn 10% dan PPh sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c) Pajak dibayar paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah transaksi; dan
 - d) Bendahara wajib melaporkan pajak-pajak yang telah dibayar kepada Kantor Pelayanan Pajak.
 - 4) Kegiatan penyediaan makan dan minuman dikenakan pajak daerah sebesar 10% dan dibayarkan melalui BPKD Kabupaten Pekalongan.
8. Pengenaan bea meterai pada pelaksanaan kegiatan ADD. Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarannya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai. Ketentuan bea meterai dalam pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:
- a. Transaksi sampai dengan nilai nominal Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tidak dikenakan bea meterai;
 - b. Transaksi dengan nilai nominal lebih dari Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dikenakan bea meterai sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah); dan
 - c. Transaksi dengan nilai nominal lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikenakan bea meterai sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah).

E. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN.

1. Laporan SPJ dibuat oleh Kepala Desa mengacu pada format Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dengan pedoman pada ketentuan yang berlaku disampaikan kepada Camat selaku Ketua Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kecamatan. SPJ dibuat sekurang-kurangnya 2 (dua) rangkap, dengan ketentuan SPJ asli disimpan di Desa, dan salinan SPJ diserahkan ke Camat;
2. Camat melakukan penelitian SPJ yang diterima dari Desa sebagaimana point 1;
3. Apabila dari hasil penelitian SPJ ditemukan ada kekurangan lampiran atau bukti pengeluaran keuangan maka Kepala Desa wajib untuk melengkapi kekurangannya, dan apabila ditemukan

- SPJ tidak sesuai antara rencana penggunaan dengan realisasinya, maka Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa Tingkat Kecamatan mengadakan klarifikasi langsung ke Desa paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah SPJ diterima;
4. Apabila hasil klarifikasi langsung ke Desa ditemukan adanya penyimpangan, maka Camat mengembalikan SPJ kepada Kepala Desa untuk dilakukan perbaikan;
 5. Camat menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD (tanpa dokumen SPJ) kepada Bupati cq. Kepala Dinas PMD, P3A dan PPKB paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada point 1.

F. PENGAWASAN ALOKASI DANA DESA.

1. Pengawasan pelaksanaan ADD dilakukan oleh:
 - a. Pengawasan oleh masyarakat Desa yang bersangkutan secara umum berupa kritik dan saran yang bersifat membangun; dan
 - b. Pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten.
2. Dalam hal terjadi persoalan/permasalahan pelaksanaan kegiatan ADD, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari Tingkat Desa, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. PENUTUP.

Demikian Pedoman Teknis Pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2020, guna menjadi pedoman dan acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan ADD di Kabupaten Pekalongan.

II. CONTOH FORMAT DOKUMEN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA.

A. FORMAT PERMOHONAN PENYALURAN ADD.

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
KECAMATAN

PEMERINTAH DESA

Jln. Telp. Kode Pos

Nomor :
Lamp. :
Perihal : Permohonan Penyaluran
ADD Tahap ... TA 20xx

....., 20xx
Kepada:
Yth. Bupati Pekalongan
cq. Kepala Dinas PMD, P3A DAN
PPKB
Lewat CAMAT

Di
TEMPAT

Berdasarkan Peraturan Desa Nomor ... Tahun ... tentang APBDes Tahun 20..., yang didalamnya memuat kegiatan bersumber dari ADD sebesar Rp..... (.....), meliputi :

1. Tahap I, sebesar 25% : Rp.....
2. Tahap II, sebesar 25% : Rp.
3. Tahap III, sebesar 25% : Rp.
4. Tahap IV, sebesar 25% : Rp.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengajukan permohonan untuk Penyaluran ADD Tahap ... sebesar Rp..... (.....), untuk ditransfer ke:

Bank :
Nomr Rekening :
Atas Nama : Pemerintah Desa

Bersama ini kami lampirkan persyaratan dan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

1.
2.
3. Dst.

Demikian atas terkabulnya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Kepala Desa

Kecamatan

Cap + Ttd

.....

B. FORMAT REKOMENDASI PENYALURAN ADD.

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
KECAMATAN

Jln. Telp. Kode Pos

REKOMENDASI

Nomor :

TENTANG
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHAP ...
TAHUN ANGGARAN 20xx

- a. Berdasarkan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penyaluran Serta Pengelolaan ADD Tahun Anggaran 2020.
- b. Sesuai surat permohonan Penyaluran ADD dari Kepala Desa..... Kecamatan Nomor Tanggal, dengan melampirkan persyaratan dan kelengkapan administrasi sebagai berikut :
 1.;
 2.;
 3. Dst... (sesuai tahapan)
 4. SPJ Tahap sudah diterima Kecamatan pada tanggal
- c. Untuk selanjutnya kami merekomendasikan penyaluran ADD tahap .. (...) Tahun Anggaran 20xx untuk Desa Kecamatan sebesar Rp..... (.....)

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

....., 20xx
Camat

.....
NIP.

C. FORMAT REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
KEGIATAN ADD.

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
KEGIATAN ADD TAHUN ANGGARAN 20xx KECAMATAN

.....

KABUPATEN PEKALONGAN

TAHAP

| No. | DESA | ANGGARAN | BID. I (Rp.) | BID. II (Rp.) | BID. III (Rp.) | BID. IV (Rp.) | BID.V (Rp.) | TOTAL (Rp.) | SISA | KET |
|------|------|----------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=4+5+6+7+8 | 10=3-9 | 11 |
| 1. | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | |
| Dst. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

....., 20xx
Camat

.....
NIP.

RINCIAN BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2020

| NO | KECAMATAN / DESA | RINCIAN ADD PER DESA | TAHAP I | TAHAP II | TAHAP III | TAHAP IV |
|------------|-----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I | KANDANG SERANG | | | | | |
| 1 | Klesem | 534.163.000 | 135.397.250 | 135.397.250 | 131.684.250 | 131.684.250 |
| 2 | Bodas | 515.044.000 | 130.496.250 | 130.496.250 | 127.025.750 | 127.025.750 |
| 3 | Gembong | 566.452.000 | 143.590.750 | 143.590.750 | 139.635.250 | 139.635.250 |
| 4 | Sukoharjo | 529.030.000 | 133.871.250 | 133.871.250 | 130.643.750 | 130.643.750 |
| 5 | Garungwiyoro | 538.237.000 | 136.173.000 | 136.173.000 | 132.945.500 | 132.945.500 |
| 6 | Bubak | 420.005.000 | 106.372.500 | 106.372.500 | 103.630.000 | 103.630.000 |
| 7 | Bojongkoneng | 440.915.000 | 111.721.250 | 111.721.250 | 108.736.250 | 108.736.250 |
| 8 | Luragung | 519.338.000 | 131.569.750 | 131.569.750 | 128.099.250 | 128.099.250 |
| 9 | Kandangserang | 323.520.000 | 82.008.500 | 82.008.500 | 79.751.500 | 79.751.500 |
| 10 | Wangkelang | 486.600.000 | 123.263.750 | 123.263.750 | 120.036.250 | 120.036.250 |
| 11 | Lambur | 419.175.000 | 106.165.000 | 106.165.000 | 103.422.500 | 103.422.500 |
| 12 | Tajur | 440.175.000 | 111.657.500 | 111.657.500 | 108.430.000 | 108.430.000 |
| 13 | Trajumas | 565.846.000 | 143.439.250 | 143.439.250 | 139.483.750 | 139.483.750 |
| 14 | Karanggondang | 438.623.000 | 111.027.000 | 111.027.000 | 108.284.500 | 108.284.500 |
| II | PANINGGARAN | - | - | - | - | - |
| 1 | Werdi | 540.785.000 | 137.052.750 | 137.052.750 | 133.339.750 | 133.339.750 |
| 2 | Winduaji | 465.190.000 | 117.790.000 | 117.790.000 | 114.805.000 | 114.805.000 |
| 3 | Krandegan | 395.170.000 | 100.042.250 | 100.042.250 | 97.542.750 | 97.542.750 |
| 4 | Lumeneng | 615.928.000 | 156.081.250 | 156.081.250 | 151.882.750 | 151.882.750 |
| 5 | Tangeran | 478.932.000 | 121.346.750 | 121.346.750 | 118.119.250 | 118.119.250 |
| 6 | Kaliboga | 486.101.000 | 123.260.500 | 123.260.500 | 119.790.000 | 119.790.000 |
| 7 | Kaliombo | 387.222.000 | 98.055.250 | 98.055.250 | 95.555.750 | 95.555.750 |
| 8 | Botosari | 496.879.000 | 125.955.000 | 125.955.000 | 122.484.500 | 122.484.500 |
| 9 | Sawangan | 446.154.000 | 112.909.750 | 112.909.750 | 110.167.250 | 110.167.250 |
| 10 | Paninggaran | 508.825.000 | 128.941.500 | 128.941.500 | 125.471.000 | 125.471.000 |
| 11 | Domiyang | 568.939.000 | 144.212.500 | 144.212.500 | 140.257.000 | 140.257.000 |
| 12 | Notogiwang | 539.472.000 | 136.603.250 | 136.603.250 | 133.132.750 | 133.132.750 |
| 13 | Lambanggelun | 592.234.000 | 150.036.250 | 150.036.250 | 146.080.750 | 146.080.750 |
| 14 | Tenogo | 450.237.000 | 114.051.750 | 114.051.750 | 111.066.750 | 111.066.750 |
| 15 | Bedagung | 447.701.000 | 113.417.750 | 113.417.750 | 110.432.750 | 110.432.750 |
| III | LEBAKBARANG | - | - | - | - | - |
| 1 | Tembelangunung | 386.868.000 | 97.966.750 | 97.966.750 | 95.467.250 | 95.467.250 |
| 2 | Pamutuh | 402.603.000 | 102.022.000 | 102.022.000 | 99.279.500 | 99.279.500 |
| 3 | Depok | 304.136.000 | 77.041.250 | 77.041.250 | 75.026.750 | 75.026.750 |
| 4 | Wonosido | 333.345.000 | 84.464.750 | 84.464.750 | 82.207.750 | 82.207.750 |
| 5 | Timbangsari | 332.428.000 | 84.235.500 | 84.235.500 | 81.978.500 | 81.978.500 |
| 6 | Sidomulyo | 419.427.000 | 106.228.000 | 106.228.000 | 103.485.500 | 103.485.500 |
| 7 | Kutorembet | 373.470.000 | 94.617.250 | 94.617.250 | 92.117.750 | 92.117.750 |
| 8 | Lebakbarang | 484.393.000 | 122.833.500 | 122.833.500 | 119.363.000 | 119.363.000 |
| 9 | Kapundutan | 335.619.000 | 85.033.250 | 85.033.250 | 82.776.250 | 82.776.250 |
| 10 | Bantar Kulon | 305.991.000 | 77.505.000 | 77.505.000 | 75.490.500 | 75.490.500 |
| 11 | Mendolo | 447.701.000 | 113.417.750 | 113.417.750 | 110.432.750 | 110.432.750 |
| IV | PETUNGKRIYONO | - | - | - | - | - |
| 1 | Simego | 434.514.000 | 110.121.000 | 110.121.000 | 107.136.000 | 107.136.000 |
| 2 | Songgodadi | 416.196.000 | 105.541.500 | 105.541.500 | 102.556.500 | 102.556.500 |
| 3 | Curugmuncar | 379.431.000 | 96.107.500 | 96.107.500 | 93.608.000 | 93.608.000 |
| 4 | Gumelem | 294.719.000 | 74.565.500 | 74.565.500 | 72.794.000 | 72.794.000 |
| 5 | Tlogohendro | 511.859.000 | 129.821.250 | 129.821.250 | 126.108.250 | 126.108.250 |
| 6 | Yosorejo | 427.265.000 | 108.308.750 | 108.308.750 | 105.323.750 | 105.323.750 |
| 7 | Tlogopakis | 526.290.000 | 133.429.000 | 133.429.000 | 129.716.000 | 129.716.000 |
| 8 | Kasimpur | 385.977.000 | 97.865.500 | 97.865.500 | 95.123.000 | 95.123.000 |
| 9 | Kayupuring | 428.727.000 | 108.674.250 | 108.674.250 | 105.689.250 | 105.689.250 |
| V | TALUN | - | - | - | - | - |
| 1 | Mesoyi | 414.509.000 | 104.998.500 | 104.998.500 | 102.256.000 | 102.256.000 |
| 2 | Jolotigo | 443.393.000 | 112.219.500 | 112.219.500 | 109.477.000 | 109.477.000 |
| 3 | Sengare | 535.919.000 | 135.715.000 | 135.715.000 | 132.244.500 | 132.244.500 |
| 4 | Donowangun | 459.788.000 | 116.439.500 | 116.439.500 | 113.454.500 | 113.454.500 |
| 5 | Talun | 350.370.000 | 88.721.000 | 88.721.000 | 86.464.000 | 86.464.000 |
| 6 | Banjarsari | 375.754.000 | 95.188.250 | 95.188.250 | 92.688.750 | 92.688.750 |
| 7 | Kalirejo | 380.081.000 | 96.270.000 | 96.270.000 | 93.770.500 | 93.770.500 |
| 8 | Batursari | 333.242.000 | 84.439.000 | 84.439.000 | 82.182.000 | 82.182.000 |
| 9 | Karangasem | 403.180.000 | 102.166.250 | 102.166.250 | 99.423.750 | 99.423.750 |
| 10 | Krompeng | 387.709.000 | 98.298.500 | 98.298.500 | 95.556.000 | 95.556.000 |
| VI | DORO | - | - | - | - | - |
| 1 | Pungangan | 364.469.000 | 92.367.000 | 92.367.000 | 89.867.500 | 89.867.500 |
| 2 | Sidoharjo | 391.487.000 | 99.243.000 | 99.243.000 | 96.500.500 | 96.500.500 |
| 3 | Lemahabang | 440.674.000 | 111.539.750 | 111.539.750 | 108.797.250 | 108.797.250 |
| 4 | Rogoselo | 407.243.000 | 103.060.500 | 103.060.500 | 100.561.000 | 100.561.000 |
| 5 | Harjosari | 400.304.000 | 101.447.250 | 101.447.250 | 98.704.750 | 98.704.750 |
| 6 | Larikan | 363.281.000 | 92.070.000 | 92.070.000 | 89.570.500 | 89.570.500 |
| 7 | Sawangan | 404.369.000 | 102.463.500 | 102.463.500 | 99.721.000 | 99.721.000 |
| 8 | Dororejo | 379.679.000 | 96.169.500 | 96.169.500 | 93.670.000 | 93.670.000 |
| 9 | Doro | 453.054.000 | 114.877.250 | 114.877.250 | 111.649.750 | 111.649.750 |
| 10 | Randusari | 359.581.000 | 91.145.000 | 91.145.000 | 88.645.500 | 88.645.500 |
| 11 | Kutosari | 385.486.000 | 97.500.000 | 97.500.000 | 95.243.000 | 95.243.000 |
| 12 | Wringinagung | 388.063.000 | 98.265.500 | 98.265.500 | 95.766.000 | 95.766.000 |
| 13 | Kalimojosari | 419.336.000 | 106.205.250 | 106.205.250 | 103.462.750 | 103.462.750 |
| 14 | Bligorejo | 447.701.000 | 113.417.750 | 113.417.750 | 110.432.750 | 110.432.750 |

| VII KARANGANYAR | | - | - | - | - | - |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Gutomo | 406.135.000 | 102.905.000 | 102.905.000 | 100.162.500 | 100.162.500 |
| 2 | Limongan | 375.152.000 | 95.037.750 | 95.037.750 | 92.538.250 | 92.538.250 |
| 3 | Karanggondang | 358.809.000 | 90.952.000 | 90.952.000 | 88.452.500 | 88.452.500 |
| 4 | Lolong | 312.397.000 | 79.106.500 | 79.106.500 | 77.092.000 | 77.092.000 |
| 5 | Pedawang | 438.641.000 | 111.031.500 | 111.031.500 | 108.289.000 | 108.289.000 |
| 6 | Pododadi | 428.906.000 | 108.719.000 | 108.719.000 | 105.734.000 | 105.734.000 |
| 7 | Legokalong | 453.818.000 | 114.947.000 | 114.947.000 | 111.962.000 | 111.962.000 |
| 8 | Karangsari | 438.464.000 | 111.108.500 | 111.108.500 | 108.123.500 | 108.123.500 |
| 9 | Kulu | 429.256.000 | 108.806.500 | 108.806.500 | 105.821.500 | 105.821.500 |
| 10 | Banjarejo | 372.617.000 | 94.404.000 | 94.404.000 | 91.904.500 | 91.904.500 |
| 11 | Wonosari | 427.702.000 | 108.418.000 | 108.418.000 | 105.433.000 | 105.433.000 |
| 12 | Sokosari | 407.099.000 | 103.146.000 | 103.146.000 | 100.403.500 | 100.403.500 |
| 13 | Sidomukti | 396.524.000 | 100.380.750 | 100.380.750 | 97.881.250 | 97.881.250 |
| 14 | Kayugeritan | 482.473.000 | 122.353.500 | 122.353.500 | 118.883.000 | 118.883.000 |
| 15 | Kutosari | 328.263.000 | 83.194.250 | 83.194.250 | 80.937.250 | 80.937.250 |
| VIII KAJEN | | - | - | - | - | - |
| 1 | Tambakroto | 447.701.000 | 113.417.750 | 113.417.750 | 110.432.750 | 110.432.750 |
| 2 | Kutorojo | 448.603.000 | 113.764.500 | 113.764.500 | 110.537.000 | 110.537.000 |
| 3 | Linggaasri | 416.681.000 | 105.541.500 | 105.541.500 | 102.799.000 | 102.799.000 |
| 4 | Brengkolang | 357.461.000 | 90.615.000 | 90.615.000 | 88.115.500 | 88.115.500 |
| 5 | Pringsurat | 328.884.000 | 83.349.500 | 83.349.500 | 81.092.500 | 81.092.500 |
| 6 | Sokoyoso | 416.196.000 | 105.541.500 | 105.541.500 | 102.556.500 | 102.556.500 |
| 7 | Sinangohprendeng | 368.575.000 | 93.393.500 | 93.393.500 | 90.894.000 | 90.894.000 |
| 8 | Kajongan | 333.988.000 | 84.625.500 | 84.625.500 | 82.368.500 | 82.368.500 |
| 9 | Pekiringanageng | 360.958.000 | 91.489.250 | 91.489.250 | 88.989.750 | 88.989.750 |
| 10 | Gandarum | 503.598.000 | 127.634.750 | 127.634.750 | 124.164.250 | 124.164.250 |
| 11 | Sabarwangi | 346.650.000 | 87.791.000 | 87.791.000 | 85.534.000 | 85.534.000 |
| 12 | Kalijoyo | 432.722.000 | 109.673.000 | 109.673.000 | 106.688.000 | 106.688.000 |
| 13 | Wonorejo | 359.415.000 | 91.103.500 | 91.103.500 | 88.604.000 | 88.604.000 |
| 14 | Pekiringanalit | 459.527.000 | 116.495.500 | 116.495.500 | 113.268.000 | 113.268.000 |
| 15 | Kutorejo | 354.967.000 | 89.870.250 | 89.870.250 | 87.613.250 | 87.613.250 |
| 16 | Nyamok | 423.322.000 | 107.323.000 | 107.323.000 | 104.338.000 | 104.338.000 |
| 17 | Tanjungkulon | 336.280.000 | 85.198.500 | 85.198.500 | 82.941.500 | 82.941.500 |
| 18 | Tanjungsari | 401.681.000 | 101.791.500 | 101.791.500 | 99.049.000 | 99.049.000 |
| 19 | Gejlig | 513.292.000 | 129.936.750 | 129.936.750 | 126.709.250 | 126.709.250 |
| 20 | Kebonagung | 501.080.000 | 127.005.250 | 127.005.250 | 123.534.750 | 123.534.750 |
| 21 | Sangkanjoyo | 416.681.000 | 105.541.500 | 105.541.500 | 102.799.000 | 102.799.000 |
| 22 | Salit | 485.601.000 | 123.014.000 | 123.014.000 | 119.786.500 | 119.786.500 |
| 23 | Sambiroto | 481.010.000 | 121.866.250 | 121.866.250 | 118.638.750 | 118.638.750 |
| 24 | Rowolaku | 386.786.000 | 97.946.250 | 97.946.250 | 95.446.750 | 95.446.750 |
| IX KESESI | | - | - | - | - | - |
| 1 | Windurojo | 504.594.000 | 127.641.000 | 127.641.000 | 124.656.000 | 124.656.000 |
| 2 | Ujungnegoro | 409.473.000 | 103.739.500 | 103.739.500 | 100.997.000 | 100.997.000 |
| 3 | Brondong | 371.833.000 | 94.208.000 | 94.208.000 | 91.708.500 | 91.708.500 |
| 4 | Podosari | 395.570.000 | 100.142.250 | 100.142.250 | 97.642.750 | 97.642.750 |
| 5 | Kwasen | 417.982.000 | 105.866.750 | 105.866.750 | 103.124.250 | 103.124.250 |
| 6 | Langensari | 416.681.000 | 105.541.500 | 105.541.500 | 102.799.000 | 102.799.000 |
| 7 | Jagung | 379.218.000 | 96.054.250 | 96.054.250 | 93.554.750 | 93.554.750 |
| 8 | Watugajah | 330.679.000 | 83.798.250 | 83.798.250 | 81.541.250 | 81.541.250 |
| 9 | Karangrejo | 356.499.000 | 90.132.000 | 90.132.000 | 88.117.500 | 88.117.500 |
| 10 | Karyomukti | 312.343.000 | 79.093.000 | 79.093.000 | 77.078.500 | 77.078.500 |
| 11 | Kesesi | 489.621.000 | 124.140.500 | 124.140.500 | 120.670.000 | 120.670.000 |
| 12 | Srinahan | 348.403.000 | 88.229.250 | 88.229.250 | 85.972.250 | 85.972.250 |
| 13 | Kaibahan | 367.390.000 | 93.097.250 | 93.097.250 | 90.597.750 | 90.597.750 |
| 14 | Watupayung | 331.512.000 | 84.006.500 | 84.006.500 | 81.749.500 | 81.749.500 |
| 15 | Krandon | 409.212.000 | 103.674.250 | 103.674.250 | 100.931.750 | 100.931.750 |
| 16 | Ponolawen | 368.351.000 | 93.337.500 | 93.337.500 | 90.838.000 | 90.838.000 |
| 17 | Kalimade | 400.655.000 | 101.535.000 | 101.535.000 | 98.792.500 | 98.792.500 |
| 18 | Sidomulyo | 386.147.000 | 97.665.250 | 97.665.250 | 95.408.250 | 95.408.250 |
| 19 | Sukorejo | 400.696.000 | 101.545.250 | 101.545.250 | 98.802.750 | 98.802.750 |
| 20 | Sidosari | 416.681.000 | 105.541.500 | 105.541.500 | 102.799.000 | 102.799.000 |
| 21 | Mulyorejo | 348.494.000 | 88.252.000 | 88.252.000 | 85.995.000 | 85.995.000 |
| 22 | Pantirejo | 402.049.000 | 101.883.500 | 101.883.500 | 99.141.000 | 99.141.000 |
| 23 | Kwigaran | 397.531.000 | 100.754.000 | 100.754.000 | 98.011.500 | 98.011.500 |
| X SRAGI | | - | - | - | - | - |
| 1 | Ketanonageng | 332.926.000 | 84.360.000 | 84.360.000 | 82.103.000 | 82.103.000 |
| 2 | Mrican | 321.286.000 | 81.328.750 | 81.328.750 | 79.314.250 | 79.314.250 |
| 3 | Bulaksari | 499.300.000 | 126.438.750 | 126.438.750 | 123.211.250 | 123.211.250 |
| 4 | Sumublor | 473.865.000 | 120.080.000 | 120.080.000 | 116.852.500 | 116.852.500 |
| 5 | Sumubkidul | 394.424.000 | 99.855.750 | 99.855.750 | 97.356.250 | 97.356.250 |
| 6 | Kalijambe | 504.537.000 | 127.869.500 | 127.869.500 | 124.399.000 | 124.399.000 |
| 7 | Purworejo | 431.696.000 | 109.295.250 | 109.295.250 | 106.552.750 | 106.552.750 |
| 8 | Kedungjaran | 434.360.000 | 110.082.500 | 110.082.500 | 107.097.500 | 107.097.500 |
| 9 | Klunjukan | 359.642.000 | 91.039.000 | 91.039.000 | 88.782.000 | 88.782.000 |
| 10 | Gebangkerep | 605.384.000 | 153.202.500 | 153.202.500 | 149.489.500 | 149.489.500 |
| 11 | Purwodadi | 371.680.000 | 94.048.500 | 94.048.500 | 91.791.500 | 91.791.500 |
| 12 | Bulakpelem | 519.189.000 | 131.532.500 | 131.532.500 | 128.062.000 | 128.062.000 |
| 13 | Tegalsuruh | 400.777.000 | 101.565.500 | 101.565.500 | 98.823.000 | 98.823.000 |
| 14 | Krasakageng | 471.752.000 | 119.430.500 | 119.430.500 | 116.445.500 | 116.445.500 |
| 15 | Sijeruk | 371.324.000 | 93.959.500 | 93.959.500 | 91.702.500 | 91.702.500 |
| 16 | Tegalontar | 416.681.000 | 105.541.500 | 105.541.500 | 102.799.000 | 102.799.000 |

| | XI | BOJONG | - | - | - | - | - |
|----|-------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 1 | Bukur | 416.681.000 | 105.541.500 | 105.541.500 | 102.799.000 | 102.799.000 | |
| 2 | Kalipancur | 525.827.000 | 133.192.000 | 133.192.000 | 129.721.500 | 129.721.500 | |
| 3 | Sumurjomblangbogo | 471.390.000 | 119.385.750 | 119.385.750 | 116.309.250 | 116.309.250 | |
| 4 | Pantianom | 423.012.000 | 107.245.500 | 107.245.500 | 104.260.500 | 104.260.500 | |
| 5 | Randumuktiwaren | 469.465.000 | 118.980.000 | 118.980.000 | 115.752.500 | 115.752.500 | |
| 6 | Legokclile | 346.356.000 | 87.717.500 | 87.717.500 | 85.460.500 | 85.460.500 | |
| 7 | Bojongwetan | 370.392.000 | 93.847.750 | 93.847.750 | 91.348.250 | 91.348.250 | |
| 8 | Wangandowo | 452.938.000 | 114.848.250 | 114.848.250 | 111.620.750 | 111.620.750 | |
| 9 | Duwet | 342.725.000 | 86.809.750 | 86.809.750 | 84.552.750 | 84.552.750 | |
| 10 | Ketitangkidul | 323.622.000 | 81.912.750 | 81.912.750 | 79.898.250 | 79.898.250 | |
| 11 | Menjangan | 432.204.000 | 109.422.250 | 109.422.250 | 106.679.750 | 106.679.750 | |
| 12 | Ketitanglor | 305.553.000 | 77.395.500 | 77.395.500 | 75.381.000 | 75.381.000 | |
| 13 | Rejosari | 323.622.000 | 81.912.750 | 81.912.750 | 79.898.250 | 79.898.250 | |
| 14 | Bojonglor | 411.497.000 | 104.245.500 | 104.245.500 | 101.503.000 | 101.503.000 | |
| 15 | Bojongminggir | 374.014.000 | 94.753.250 | 94.753.250 | 92.253.750 | 92.253.750 | |
| 16 | Wiroditan | 355.248.000 | 89.940.500 | 89.940.500 | 87.683.500 | 87.683.500 | |
| 17 | Kemasan | 356.111.000 | 90.156.250 | 90.156.250 | 87.899.250 | 87.899.250 | |
| 18 | Jajarwayang | 377.988.000 | 95.746.750 | 95.746.750 | 93.247.250 | 93.247.250 | |
| 19 | Babalanlor | 393.461.000 | 99.615.000 | 99.615.000 | 97.115.500 | 97.115.500 | |
| 20 | Babalankidul | 351.013.000 | 88.881.750 | 88.881.750 | 86.624.750 | 86.624.750 | |
| 21 | Karangsari | 319.474.000 | 80.875.750 | 80.875.750 | 78.861.250 | 78.861.250 | |
| 22 | Sembungjambu | 441.949.000 | 111.858.500 | 111.858.500 | 109.116.000 | 109.116.000 | |
| | XII | WONOPRINGGO | - | - | - | - | - |
| 1 | Jetakkidul | 388.972.000 | 98.492.750 | 98.492.750 | 95.993.250 | 95.993.250 | |
| 2 | Sastrodirjan | 356.244.000 | 90.189.500 | 90.189.500 | 87.932.500 | 87.932.500 | |
| 3 | Legokgunung | 382.991.000 | 96.997.500 | 96.997.500 | 94.498.000 | 94.498.000 | |
| 4 | Galangpengampon | 447.701.000 | 113.417.750 | 113.417.750 | 110.432.750 | 110.432.750 | |
| 5 | Kwagean | 346.242.000 | 87.689.000 | 87.689.000 | 85.432.000 | 85.432.000 | |
| 6 | Getas | 349.533.000 | 88.511.750 | 88.511.750 | 86.254.750 | 86.254.750 | |
| 7 | Rowokembu | 432.371.000 | 109.585.250 | 109.585.250 | 106.600.250 | 106.600.250 | |
| 8 | Wonopringgo | 316.571.000 | 80.150.000 | 80.150.000 | 78.135.500 | 78.135.500 | |
| 9 | Sampih | 299.244.000 | 75.818.250 | 75.818.250 | 73.803.750 | 73.803.750 | |
| 10 | Gondang | 319.828.000 | 80.964.250 | 80.964.250 | 78.949.750 | 78.949.750 | |
| 11 | Wonorejo | 369.728.000 | 93.681.750 | 93.681.750 | 91.182.250 | 91.182.250 | |
| 12 | Jetaklengkong | 292.603.000 | 74.036.500 | 74.036.500 | 72.265.000 | 72.265.000 | |
| 13 | Pegadentengah | 320.950.000 | 81.244.750 | 81.244.750 | 79.230.250 | 79.230.250 | |
| 14 | Surobayan | 292.603.000 | 74.036.500 | 74.036.500 | 72.265.000 | 72.265.000 | |
| | XIII | KEDUNGWUNI | - | - | - | - | - |
| 1 | Rowocacing | 308.917.000 | 78.236.500 | 78.236.500 | 76.222.000 | 76.222.000 | |
| 2 | Langkap | 371.071.000 | 94.017.500 | 94.017.500 | 91.518.000 | 91.518.000 | |
| 3 | Pajomblangan | 313.437.000 | 79.366.500 | 79.366.500 | 77.352.000 | 77.352.000 | |
| 4 | Tosaran | 368.973.000 | 93.493.000 | 93.493.000 | 90.993.500 | 90.993.500 | |
| 5 | Pakisputih | 338.391.000 | 85.726.250 | 85.726.250 | 83.469.250 | 83.469.250 | |
| 6 | Kedungpatangewu | 340.301.000 | 86.203.750 | 86.203.750 | 83.946.750 | 83.946.750 | |
| 7 | Podo | 378.057.000 | 95.764.000 | 95.764.000 | 93.264.500 | 93.264.500 | |
| 8 | Kwayangan | 322.044.000 | 81.518.250 | 81.518.250 | 79.503.750 | 79.503.750 | |
| 9 | Proto | 353.112.000 | 89.406.500 | 89.406.500 | 87.149.500 | 87.149.500 | |
| 10 | Salakbrojo | 417.940.000 | 105.856.250 | 105.856.250 | 103.113.750 | 103.113.750 | |
| 11 | Ambokebang | 428.221.000 | 108.426.500 | 108.426.500 | 105.684.000 | 105.684.000 | |
| 12 | Tangkiltengah | 379.739.000 | 96.184.500 | 96.184.500 | 93.685.000 | 93.685.000 | |
| 13 | Tangkilkulon | 371.067.000 | 94.016.500 | 94.016.500 | 91.517.000 | 91.517.000 | |
| 14 | Karangdowo | 401.885.000 | 101.842.500 | 101.842.500 | 99.100.000 | 99.100.000 | |
| 15 | Bugangan | 324.394.000 | 82.105.750 | 82.105.750 | 80.091.250 | 80.091.250 | |
| 16 | Rengas | 385.859.000 | 97.714.500 | 97.714.500 | 95.215.000 | 95.215.000 | |
| | XIV | BUARAN | - | - | - | - | - |
| 1 | Coprayan | 324.768.000 | 82.199.250 | 82.199.250 | 80.184.750 | 80.184.750 | |
| 2 | Wonoyoso | 315.157.000 | 79.796.500 | 79.796.500 | 77.782.000 | 77.782.000 | |
| 3 | Pakumbulan | 369.035.000 | 93.387.250 | 93.387.250 | 91.130.250 | 91.130.250 | |
| 4 | Watusalam | 337.225.000 | 85.313.500 | 85.313.500 | 83.299.000 | 83.299.000 | |
| 5 | Simbangwetan | 321.411.000 | 81.360.000 | 81.360.000 | 79.345.500 | 79.345.500 | |
| 6 | Kertijayan | 371.310.000 | 93.956.000 | 93.956.000 | 91.699.000 | 91.699.000 | |
| 7 | Paweden | 348.284.000 | 88.199.500 | 88.199.500 | 85.942.500 | 85.942.500 | |
| | XV | TIRTO | - | - | - | - | - |
| 1 | Wuled | 336.666.000 | 85.295.000 | 85.295.000 | 83.038.000 | 83.038.000 | |
| 2 | Ngalian | 315.829.000 | 79.964.500 | 79.964.500 | 77.950.000 | 77.950.000 | |
| 3 | Pandanarum | 353.988.000 | 89.625.500 | 89.625.500 | 87.368.500 | 87.368.500 | |
| 4 | Karanganyar | 343.882.000 | 86.977.750 | 86.977.750 | 84.963.250 | 84.963.250 | |
| 5 | Silirejo | 402.174.000 | 101.793.250 | 101.793.250 | 99.293.750 | 99.293.750 | |
| 6 | Pucung | 326.939.000 | 82.742.000 | 82.742.000 | 80.727.500 | 80.727.500 | |
| 7 | Dadirejo | 468.073.000 | 118.632.000 | 118.632.000 | 115.404.500 | 115.404.500 | |
| 8 | Sidorejo | 400.012.000 | 101.252.750 | 101.252.750 | 98.753.250 | 98.753.250 | |
| 9 | Curug | 340.749.000 | 86.315.750 | 86.315.750 | 84.058.750 | 84.058.750 | |
| 10 | Tanjung | 296.966.000 | 75.127.250 | 75.127.250 | 73.355.750 | 73.355.750 | |
| 11 | Samborejo | 418.999.000 | 105.999.500 | 105.999.500 | 103.500.000 | 103.500.000 | |
| 12 | Pacar | 347.089.000 | 87.900.750 | 87.900.750 | 85.643.750 | 85.643.750 | |
| 13 | Karangjompo | 386.333.000 | 97.833.000 | 97.833.000 | 95.333.500 | 95.333.500 | |
| 14 | Tegaldowo | 383.798.000 | 97.199.250 | 97.199.250 | 94.699.750 | 94.699.750 | |
| 15 | Mulyorejo | 352.044.000 | 89.018.250 | 89.018.250 | 87.003.750 | 87.003.750 | |
| 16 | Jeruksari | 413.130.000 | 104.653.750 | 104.653.750 | 101.911.250 | 101.911.250 | |

| | XVI | WIRADESA | - | - | - | - | - |
|----|---------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| 1 | Kadipaten | 346.919.000 | 87.858.250 | 87.858.250 | 85.601.250 | 85.601.250 | |
| 2 | Delegtukang | 298.935.000 | 75.741.000 | 75.741.000 | 73.726.500 | 73.726.500 | |
| 3 | Karangjati | 312.127.000 | 79.039.000 | 79.039.000 | 77.024.500 | 77.024.500 | |
| 4 | Petukangan | 310.451.000 | 78.620.000 | 78.620.000 | 76.605.500 | 76.605.500 | |
| 5 | Wiradesa | 446.451.000 | 112.984.000 | 112.984.000 | 110.241.500 | 110.241.500 | |
| 6 | Warukidul | 339.770.000 | 86.071.000 | 86.071.000 | 83.814.000 | 83.814.000 | |
| 7 | Bondansari | 416.979.000 | 105.616.000 | 105.616.000 | 102.873.500 | 102.873.500 | |
| 8 | Warulor | 323.622.000 | 81.912.750 | 81.912.750 | 79.898.250 | 79.898.250 | |
| 9 | Kampil | 377.185.000 | 95.546.000 | 95.546.000 | 93.046.500 | 93.046.500 | |
| 10 | Kemplong | 310.882.000 | 78.727.750 | 78.727.750 | 76.713.250 | 76.713.250 | |
| 11 | Kauman | 314.261.000 | 79.572.500 | 79.572.500 | 77.558.000 | 77.558.000 | |
| | XVII | SIWALAN | - | - | - | - | - |
| 1 | Mejasem | 322.115.000 | 81.536.000 | 81.536.000 | 79.521.500 | 79.521.500 | |
| 2 | Wonosari | 345.907.000 | 87.605.250 | 87.605.250 | 85.348.250 | 85.348.250 | |
| 3 | Tengengwetan | 603.716.000 | 153.149.500 | 153.149.500 | 148.708.500 | 148.708.500 | |
| 4 | Tunjungsari | 386.147.000 | 97.665.250 | 97.665.250 | 95.408.250 | 95.408.250 | |
| 5 | Blimbingwuluh | 430.097.000 | 109.016.750 | 109.016.750 | 106.031.750 | 106.031.750 | |
| 6 | Pait | 595.776.000 | 150.921.750 | 150.921.750 | 146.966.250 | 146.966.250 | |
| 7 | Tengengkulon | 380.838.000 | 96.338.000 | 96.338.000 | 94.081.000 | 94.081.000 | |
| 8 | Rembun | 471.795.000 | 119.562.500 | 119.562.500 | 116.335.000 | 116.335.000 | |
| 9 | Yosorejo | 410.426.000 | 103.856.250 | 103.856.250 | 101.356.750 | 101.356.750 | |
| 10 | Siwalan | 500.581.000 | 126.880.500 | 126.880.500 | 123.410.000 | 123.410.000 | |
| 11 | Boyoteluk | 415.809.000 | 105.323.500 | 105.323.500 | 102.581.000 | 102.581.000 | |
| 12 | Depok | 354.642.000 | 89.789.000 | 89.789.000 | 87.532.000 | 87.532.000 | |
| 13 | Blacanan | 388.758.000 | 98.439.250 | 98.439.250 | 95.939.750 | 95.939.750 | |
| | XVIII | KARANGDADAP | - | - | - | - | - |
| 1 | Logandeng | 351.290.000 | 88.951.000 | 88.951.000 | 86.694.000 | 86.694.000 | |
| 2 | Jrebengkembang | 484.634.000 | 122.772.250 | 122.772.250 | 119.544.750 | 119.544.750 | |
| 3 | Pagumenganmas | 495.903.000 | 125.589.500 | 125.589.500 | 122.362.000 | 122.362.000 | |
| 4 | Kedungkebo | 437.772.000 | 110.935.500 | 110.935.500 | 107.950.500 | 107.950.500 | |
| 5 | Kaligawe | 387.104.000 | 98.147.250 | 98.147.250 | 95.404.750 | 95.404.750 | |
| 6 | Karangdadap | 451.132.000 | 114.275.500 | 114.275.500 | 111.290.500 | 111.290.500 | |
| 7 | Kalilembu | 380.006.000 | 96.251.250 | 96.251.250 | 93.751.750 | 93.751.750 | |
| 8 | Pangkah | 334.577.000 | 84.772.750 | 84.772.750 | 82.515.750 | 82.515.750 | |
| 9 | Kebonrowopucang | 516.292.000 | 130.808.250 | 130.808.250 | 127.337.750 | 127.337.750 | |
| 10 | Kebonsari | 505.677.000 | 128.154.500 | 128.154.500 | 124.684.000 | 124.684.000 | |
| 11 | Pegandon | 436.535.000 | 110.626.250 | 110.626.250 | 107.641.250 | 107.641.250 | |
| | XIX | WONOKERTO | - | - | - | - | - |
| 1 | Werdi | 382.382.000 | 96.845.250 | 96.845.250 | 94.345.750 | 94.345.750 | |
| 2 | Rowoyoso | 388.447.000 | 98.361.500 | 98.361.500 | 95.862.000 | 95.862.000 | |
| 3 | Bebel | 406.549.000 | 102.887.000 | 102.887.000 | 100.387.500 | 100.387.500 | |
| 4 | Wonokertowetan | 320.773.000 | 81.200.500 | 81.200.500 | 79.186.000 | 79.186.000 | |
| 5 | Sijambe | 338.988.000 | 85.754.250 | 85.754.250 | 83.739.750 | 83.739.750 | |
| 6 | Pesanggrahan | 318.593.000 | 80.655.500 | 80.655.500 | 78.641.000 | 78.641.000 | |
| 7 | Pecakaran | 345.312.000 | 87.456.500 | 87.456.500 | 85.199.500 | 85.199.500 | |
| 8 | Api-api | 384.993.000 | 97.498.000 | 97.498.000 | 94.998.500 | 94.998.500 | |
| 9 | Wonokertokulon | 357.845.000 | 90.589.750 | 90.589.750 | 88.332.750 | 88.332.750 | |
| 10 | Tratebang | 328.495.000 | 83.131.000 | 83.131.000 | 81.116.500 | 81.116.500 | |
| 11 | Semut | 378.868.000 | 95.966.750 | 95.966.750 | 93.467.250 | 93.467.250 | |
| | JUMLAH TOTAL | 109.298.623.000 | 27.685.405.750 | 27.685.405.750 | 26.963.905.750 | 26.963.905.750 | |

BUPATI PEKALONGAN,
TTD
ASIP KHOLBIHI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

ENDANG MURDININGGRUM, SH
Pembina Tk. I
Nip. 19631005 199208 2 001